



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK  # bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat



**BAPPEDA PROV. SUMBAR**  
Jl. Khatib Sulaiman No.1, Flamboyan Baru,  
Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat 26222



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman [inspektorat.sumbarprov.go.id](http://inspektorat.sumbarprov.go.id), email: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. LKjIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 Bappeda Provinsi Sumatera Barat berhasil menyusun sejumlah dokumen strategis diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025, serta dokumen evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi salah satu alat ukur yang efektif untuk mengevaluasi kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sehingga Bappeda dapat melakukan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara berkesinambungan. Semoga laporan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padang, 16 Maret 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala,



**DR. ZEFNIHAN, AP, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197410251993111001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan capaian outcome kinerja dengan hasil yang “Sangat Baik” dalam menjalankan kewenangan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan kredibel sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan mewujudkan capaian outcome kinerja, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat dukungan SDM sejumlah 71 orang dan pagu anggaran sebesar Rp 17.602.886.289,-. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pagu anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat mencapai sebesar Rp 17.163.099.094,- atau sebesar 97,50% dari total pagu anggaran dengan rata-rata capaian kinerja untuk 3 indikator sasaran strategis sebesar 95,54%.



### Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	94,61	78,90	83,39	Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25	86,24	102,36	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	87,00	87,75	100,86	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025					95,54	

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025

- 1) Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 dapat dinyatakan “berhasil”, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,54% atas 3 sasaran strategis dan realisasi anggaran sebesar 97,50%.
- 2) Capaian kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 17.163.099.094,- atau 97,50% dari total pagu anggaran sebesar Rp 17.602.886.289,- yang tersebar pada 3 (tiga) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan

serapan sebesar 97,75%, berikutnya Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 97,67% dan terakhir Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 90,94%.



### Faktor Penghambat/Kendala dalam Pencapaian Target

- 1) Masih belum maksimalnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2025.
- 2) Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga, karena pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tahapannya, tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra serta Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.
- 3) Program unggulan daerah belum sepenuhnya menjawab langsung kebutuhan daerah.
- 4) Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja pembangunan daerah.
- 5) Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai disebabkan tidak tepatnya penempatan belanja pada sub kegiatan pendukung.



### Upaya yang Telah dilakukan dalam Rangka Pencapaian Realisasi Kinerja

- 1) Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- 2) Melaksanakan Konsultasi Publik pada tanggal 24 Januari 2025 dan Musrenbang RKPD Tahun 2026 pada tanggal 15 April 2025 yang bertujuan untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan.
- 3) Mengkoordinir penyusunan pohon kinerja daerah dan pohon kinerja perangkat daerah serta merumuskan manajemen risiko prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kewilayahan bersama Bappeda Kabupaten/Kota untuk menganalisis pencapaian indikator makro pembangunan daerah, perumusan permasalahan, isu strategis daerah dan perumusan rekomendasi arah kebijakan dan intervensi kewilayahan.

- 5) Mengembangkan inovasi perencanaan, diantaranya :
  1. Sakato Plan ([sakatoplan.sumbarprov.go.id](http://sakatoplan.sumbarprov.go.id)), merupakan super Aplikasi yang menggabungkan 3 menu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan perencanaan yakni menu perencanaan, menu data dan informasi serta menu monitoring dan evaluasi.
  2. Dashboard Pembangunan ([dashboard.sumbarprov.go.id](http://dashboard.sumbarprov.go.id)), yang merupakan platform monitoring kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  3. SIGAMAD - NCH (Sistim Informasi Nagari Madani – Nagari Creative Hub), yang berfungsi menghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kelurahan yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.
  4. SILEK (Sistem Informasi Lepas dari Kemiskinan), yaitu instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat.
  5. Sumbarepreneur ([sumbarepreneur.sumbarprov.go.id](http://sumbarepreneur.sumbarprov.go.id)), merupakan system informasi yang digunakan untuk pendaftaran kelompok sasaran melalui sistem informasi untuk mengikuti program pengembangan kewirausahaan daerah dalam rangka mencetak 100 ribu Millenial Entrepreneur, Woman Entrepreneur dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- 6) Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas Dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah melalui pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah pada tanggal 13 s.d 31 Mei 2025.
- 7) Meningkatkan kualitas pembinaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota melalui Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- 8) Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dalam rangka Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah setiap triwulan .
- 9) Meningkatkan kapasitas Fungsional Perencana baik ditingkat Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Sumatera Barat melalui pelaksanaan Ngaji Plan The Series dan Bedah Makro Pembangunan Daerah pada bulan November s.d Desember 2025.



#### **Upaya untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kinerja di Tahun 2026**

- 1) Melakukan upaya perbaikan pada pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang, diantaranya.

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang dilaksanakan per tema/prioritas pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah.
2. Mendorong keterlibatan aktif akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan.
3. Menyediakan platform digital partisipatif untuk menjaring masukan dari masyarakat.
4. Menindaklanjuti hasil Musrenbang dan menginformasikan kepada Publik melalui media massa.
- 2) Mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kemendagri dan/atau Bappenas agar Keselarasan dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen RPJMN dan RKP dapat mencapai nilai yang Maksimum.
- 3) Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- 4) Penguatan mekanisme pengendalian pelaksanaan verifikasi dengan upaya mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan dan melaporkan kehadiran tim verifikasi kepada Pimpinan dan memasukkan kedalam WA group yang bisa diakses Kepala Perangkat Daerah.
- 5) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap data yang dibutuhkan kepada OPD dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan selalu diperbaharui dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan.
- 6) Berkolaborasi dan melibatkan secara aktif tokoh masyarakat, LSM dan Komunitas Lokal dalam proses perencanaan termasuk dalam melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan.
- 7) Menyampaikan hasil pembangunan secara transparan kepada masyarakat melalui dashboard pembangunan secara berkala setiap bulannya
- 8) Membuat Pedoman atau SOP Mekanisme Pengendalian terhadap Evaluasi Rencana Pembangunan.
- 9) Penerapan Manajemen Risiko dalam penyusunan perencanaan sebagai upaya awal terhadap kemungkinan munculnya penghambat tercapainya target pembangunan daerah.
- 10) Mengembangkan profesionalisme perencana melalui penulisan dan publikasi policy paper dan policy brief terkait perencanaan pembangunan daerah dan dinamikanya.



### Penghargaan Tahun 2025

- 1) Peringkat ke-4 sebagai Tim Pembina Provinsi Terbaik se- Indonesia dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Kementerian Kesehatan.
- 2) Penghargaan dari Polda Sumatera Barat atas Dedikasi dan Kontribusi dalam Mendukung Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Keselamatan Berjalan Lintas, serta Peran Aktif dalam Sinkronisasi Kebijakan yang Memperkuat Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GRAFIK .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
1.1     Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi.....	1
1.1.3 Struktur Organisasi .....	7
1.2.4 Sumber Daya Manusia .....	8
1.2     Aspek Organisasi .....	10
1.3     Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	12
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	14
2.1     Tujuan dan Sasaran OPD .....	14
2.2     Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	19
2.3     Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	22
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
3.1     Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	24
3.2     Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025 .....	25
3.3     Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.3.1 Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas .....	27
3.3.2 Tujuan 2 : Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani .....	45
3.4     Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	69
3.5     Penghargaan Tahun 2025 .....	79
BAB IV    PENUTUP .....	
4.1     Kesimpulan .....	80
4.2     Tindak Lanjut kedepan .....	81
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2025	
2. Penghargaan yang diterima Tahun 2025	
3. Matrik Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024	
4. Bukti Dukung Hasil Kinerja Tahun 2025	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	8
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	9
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	10
Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 .....	15
Tabel 2.2	Strategi dan arah Kebijakan Jangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021 .....	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	24
Tabel 3.2	Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ...	25
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi Tahun 2025 .....	27
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tahun 2025 .....	30
Tabel 3.5	Rangkuman Kertas Kerja Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 .....	31
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026 .....	33
Tabel 3.7	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan .....	40
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani Tahun 2025 .....	45
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025 .....	47
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026 .....	49
Tabel 3.11	Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 .....	50
Tabel 3.12	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	55
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2025 .....	57
Tabel 3.14	Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Responden dan Per Unsur Pelayanan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 .....	57
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 .....	60
Tabel 3.16	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi .....	66

Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 .....	70
Tabel 3.18	Anggaran dan Realisasi Per Sub Kegiatan Tahun 2025 .....	72

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	9
Grafik 1.2	Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	10
Grafik 3.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d Tahun 2025 .....	26
Grafik 3.2	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2024 dan 2025 .....	32
Grafik 3.3	Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2021 s.d 2025 ..	32
Grafik 3.4	Perbandingan Indeks Kualitas Perencanaan dengan Nasional dan Beberapa Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2025 .....	34
Grafik 3.5	Capaian Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2025 .....	48
Grafik 3.6	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2024 dan 2025 .....	48
Grafik 3.7	Perkembangan Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2021 s.d 2025 .....	50
Grafik 3.8	Perbandingan Nilai SAKIP Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas .....	51
Grafik 3.9	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2024 dan 2025 .....	60
Grafik 3.10	Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2025 .....	61
Grafik 3.11	Perbandingan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 s.d 2025 .....	62
Grafik 3.12	Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Per Bulan Tahun 2025 .....	69
Grafik 3.13	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat .....	7
Gambar 1.2	Pohon Kinerja Kinerja Bappeda .....	11
Gambar 3.1	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan pada Tahun 2025 .....	30
Gambar 3.2	Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat .....	64

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat atau disingkat dengan nama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.1.2 Tugas dan Fungsi**

Tugas dan dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat diatur didalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sebagai berikut :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- 2) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Badan;
  - b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
  - c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Badan;
  - d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Badan;
  - e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan Dokumentasi internal Badan;
  - f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Badan;
  - h. pengelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Badan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b. penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang;
- d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyelenggaraan Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD;
- f. penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- h. penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan Daerah;
- i. penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan;
- j. penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- k. penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

### 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- c. penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - i. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - k. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - l. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- 1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah;
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- f. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

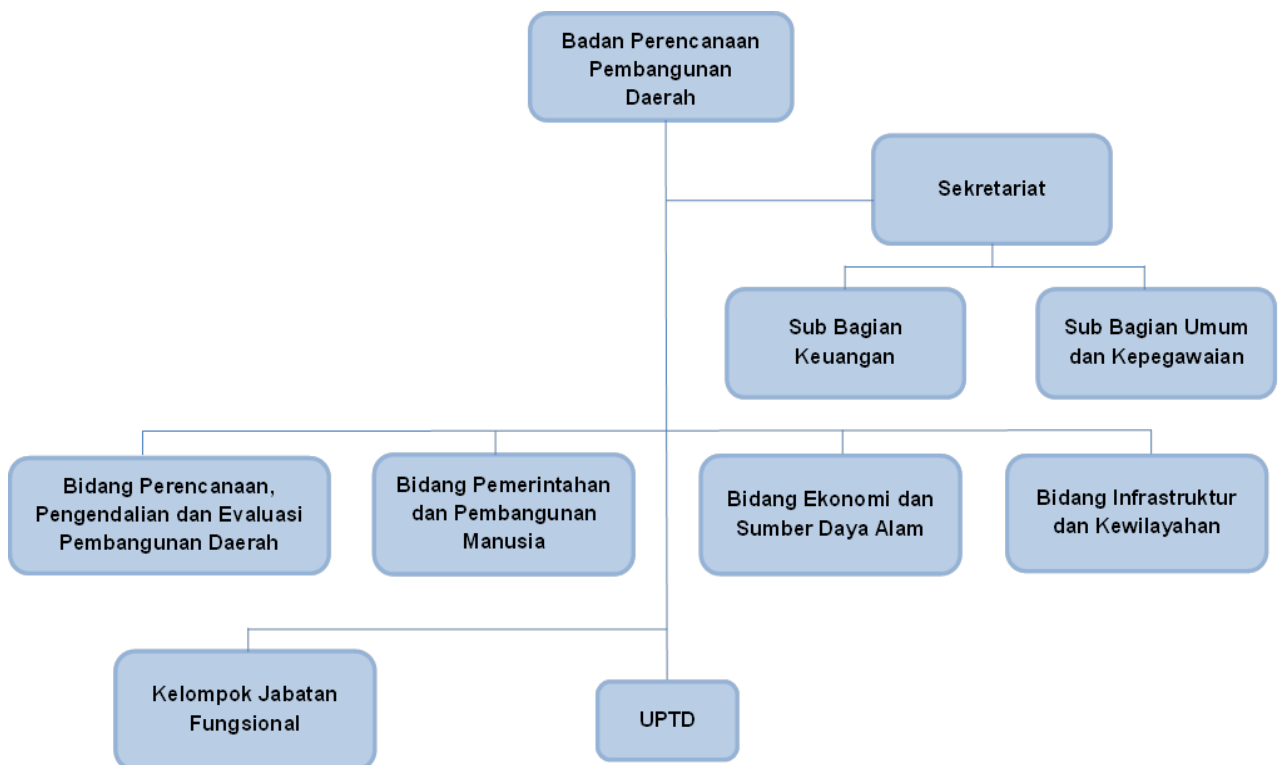
## 5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1) Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  - c. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayaha;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW;
  - g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - h. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - l. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 1.1.3 Struktur Organisasi

Secara kelembagaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat Eselon II Provinsi. Unsur pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut :

**Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat**  
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023)



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023

### 1.1.4 Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Bappeda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia sebanyak 71 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di 4 bidang dan 1 kesekretariatan, dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025**

No	Uraian	Eselo n II	Eselo n III	Eselo n IV	Fung. Perencana	Fung. Umum	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	2	2	16	21
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	6	3	10
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	-	10	5	16
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	-	1	-	5	5	11
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	1	-	7	4	12
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>71</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

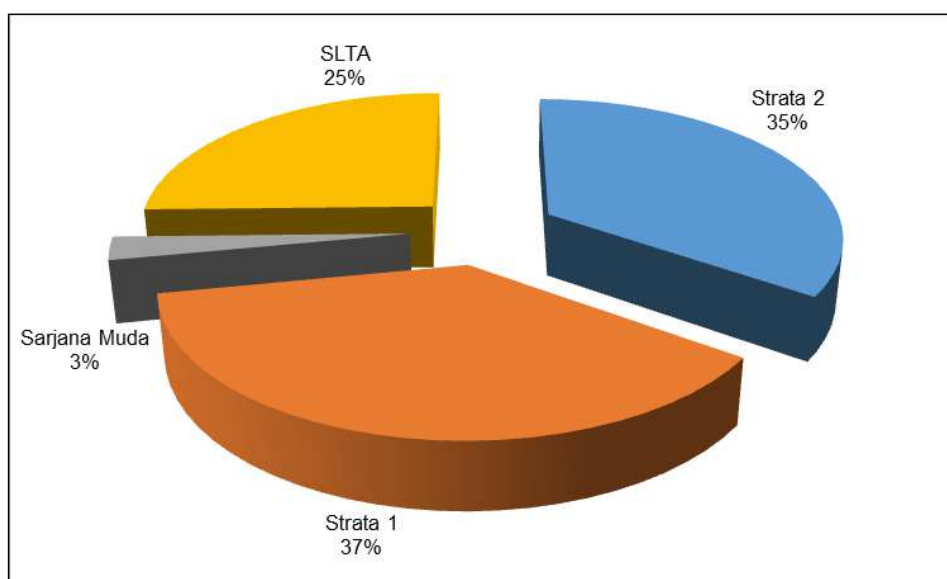
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan Fungsional Perencana dibandingkan Fungsional Umum. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mengharuskan sebagian besar pegawainya adalah berstatus Fungsional Tertentu yaitu Fungsional Perencana.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi ASN di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 27 orang atau sebesar 37%, strata 2 sebanyak 25 orang atau sebesar 35%, Sarjana Muda sebanyak 1 orang atau sebesar 3%, dan SLTA sebanyak 18 orang atau sebesar 25%. Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

**Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

No	Uraian	Strata 2	Strata 1	Sarjana Muda	SLTA	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	9	-	10	21
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	3	-	2	10
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	8	-	2	16
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	6	3	1	1	11
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5	4	-	3	12
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>71</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

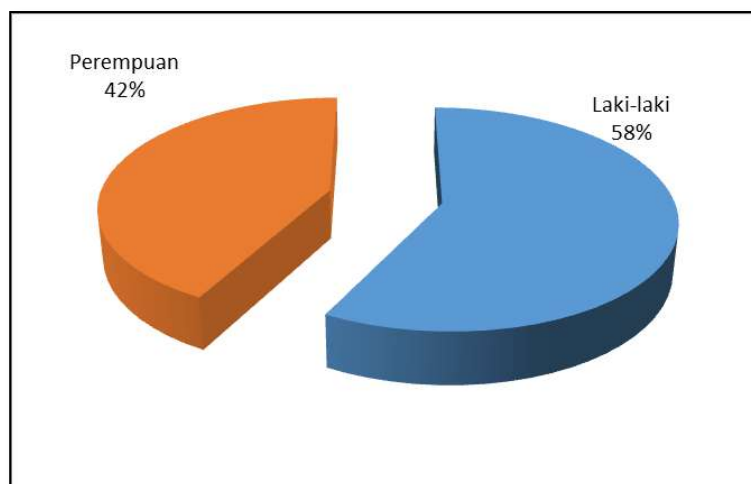
**Grafik 1.1 Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 58% dan perempuan sebanyak 30 orang atau sebesar 42%. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

**Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	1
2.	Sekretariat	12	9	21
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	5	10
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10	6	16
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	6	5	11
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7	5	12
	<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>71</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

**Grafik 1.2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Secara keseluruhan, dengan kondisi dan peta kekuatan SDM Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang ada saat ini, kinerja organisasi mampu dijalankan dengan baik sehingga capaian kinerja dapat tercapai. Namun demikian, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM diperlukan guna memenuhi standar beban kerja pegawai yang ideal dan mewujudkan talenta SDM yang berintegritas, visioner dan unggul.

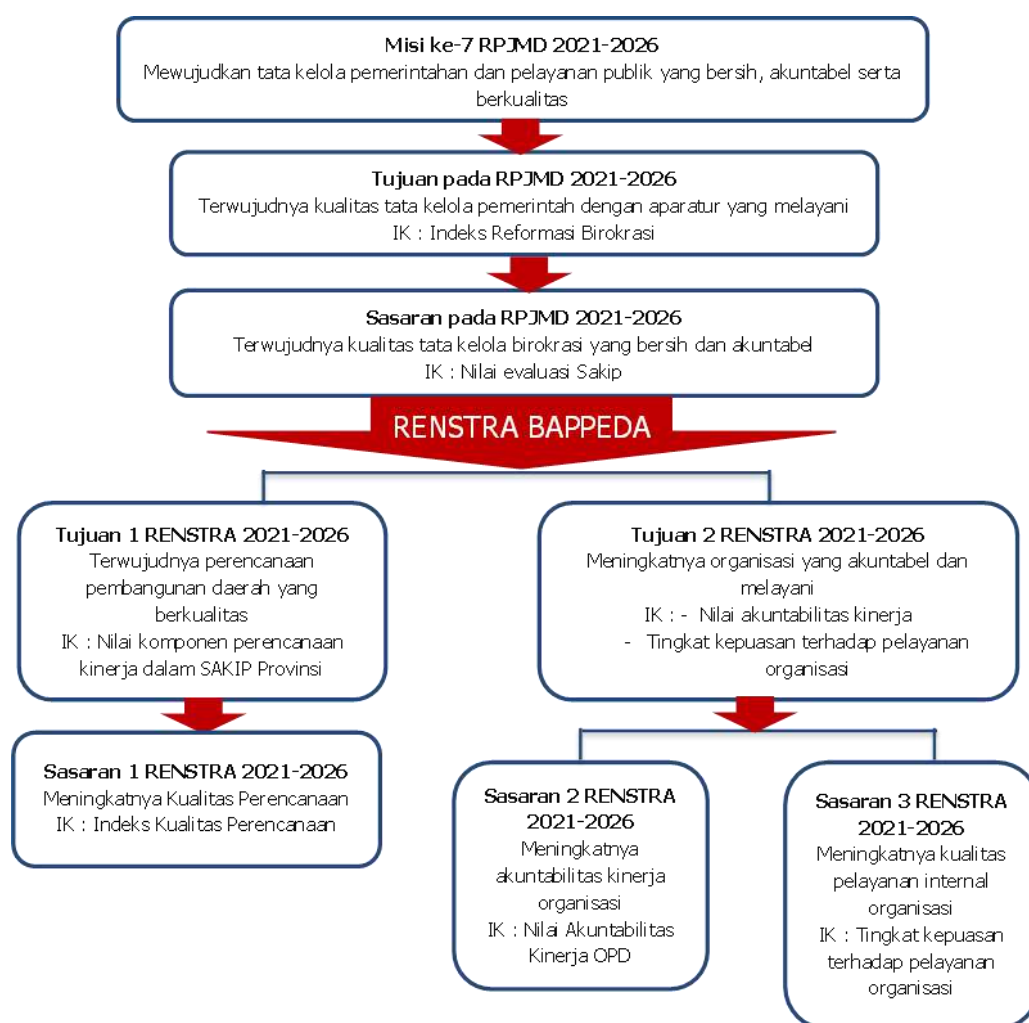
## 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendukung Misi ke-7 Kepala Daerah yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan skema kinerja yang digambarkan melalui Pohon Kinerja sebagai berikut :

### Gambar 1.2. Pohon Kinerja Kinerja Bappeda

(Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026)



Sumber : Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Selanjutnya komitmen Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, seiring

dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi strategis, antara lain :

1. Menguatkan peran Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang memastikan : 1) proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas; 2) kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial; 3) Sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan terjaga; dan 4) kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah berjalan maksimal.
2. Dalam konteks pengembangan informasi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang telah dibangun yaitu Sistem Informasi Perencanaan Sakato Plan.
3. Ketersediaan SDM Perencana yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel.

### **1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi**

Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan menyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional. Sebagaimana diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan mengakibatkan Pemerintah Daerah dan Bappeda khususnya sebagai penyelenggara urusan penunjang perencanaan harus menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang baru untuk perencanaan berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

1. Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal :
  - a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal.
  - b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.
2. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah:
  - a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal.
  - b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan.
  - c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.
  - d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.
3. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal:
  - a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal.
  - b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal.
  - c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.
  - d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Tujuan dan Sasaran OPD

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan cascading kinerja, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendukung Misi ke-7 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Terkait hal tersebut, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dengan indikator tujuan yaitu Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator tujuan yaitu a) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan b) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran yang dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

MISI KE-7 RPJMD 2021-2026 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas												
TUJUAN RPJMD 2021-2026 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani												
SASARAN RPJMD 2021-2026: Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel												
Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat :												
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi			Nilai komponen perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) diperoleh dari : a. rencana strategis (10%) meliputi : 1) pemenuhan renstra 2% 2) kualitas renstra 5%, 3) implementasi renstra 3%. b. perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi : 1) pemenuhan RKT 4%	25,20	25,60	25,84	26,07	26,38	26,62	26,87

					2) kualitas RKT 10% 3) implementasi RKT 6%.							
			Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan = Dimensi penilaian terhadap Proses 30% + Dimensi Isi Dokumen 40% + Dimensi Tindak Lanjut 30%	N.A	70	73	77	81	85	89
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja				74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi				75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00
			Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat baik : $\geq 91$ Baik : 81-90 Sedang : 71-80 Buruk : $< 70$	75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD setiap tahunnya yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah  
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas	Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial	Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
			Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
			Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah di akses dan Mutakhir berbasis Satu Data
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM organisasi
		Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Meningkatkan pelayanan umum organisasi	Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur yang dipedomani
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi	Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani
		Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD	Peningkatan pengelolaan BMD
		Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi	Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Di samping itu, perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 Januari 2025. Akan tetapi, perjanjian kinerja ini mengalami perubahan, dimana terjadi penyesuaian target sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan berpedoman pada hasil evaluasi kinerja tahun 2024 serta adanya perubahan formula penghitungan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan memanfaatkan aplikasi Sepakat yang di jalankan oleh Biro Organisasi (<https://sepakat.sumbarprov.go.id/>). Penyesuaian formula tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran, memperkuat objektivitas penilaian, serta memastikan keselarasan dengan standar nasional

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2025 memperjanjikan pencapaian 2 tujuan dengan 3 sasaran yang diukur dengan 3 indikator kinerja tujuan dan 3 indikator kinerja sasaran. APBD awal yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.20.326.084.874,- terjadi perubahan anggaran pada APBDP Tahun 2025 menjadi Rp.17.602.886.289,-. Berikut ini diuraikan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

**Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1.1 Indeks Kualitas Perencanaan	95	94,61
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25	84,25
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	3.1 Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	98	87,00

No.	Program	Anggaran (Rp.)		Selisih	Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.709.888.374	16.209.768.037	(1.500.120.337)	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.371.298.000	766.461.262	(604.836.738)	APBD

No.	Program	Anggaran (Rp.)		Selisih	Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.244.898.500	626.656.990	(618.241.510)	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>20.326.084.874</b>	<b>17.602.886.289</b>	<b>(2.723.198.585)</b>	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun formula penghitungan indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan

Untuk tahun 2025, hasil pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dilakukan berdasarkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), dengan formula sebagai berikut :

*Indeks Kualitas Perencanaan*

*= Jumlah skor aspek Sinergi + Kualitas Perencanaan*

*+ Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja*

No	Aspek	Bobot	Indikator	Bobot	Dokumen yang dinilai
1.	Sinergi	32	Keselarasn Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	9	RPJMD
			Keselarasn Dokumen RKPD dengan RKP	13	RKPD
			Kesesuaian Anggaran Daerah dalam kontribusinya terhadap	10	RKPD

No	Aspek	Bobot	Indikator	Bobot	Dokumen yang dinilai
			PN di daerah		
2.	Kualitas Perencanaan	58	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target-Program / Kegiatan di RPJMD atau RKPD	49	RKPD
			Program Unggulan Perencanaan Pembangunan	9	RKPD
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	10	Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga Terkait	10	RPJMD – Renstra OPD / RKPD-Renja OPD

## 2. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD diambilkan dari hasil evaluasi Inspektorat terhadap nilai SAKIP Bappeda Tahun n-1 yang dikeluarkan pada bulan Maret Tahun ke-n.

## 3. Indikator Kinerja Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Realisasi indikator kinerja Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dihitung berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Aplikasi Sepakat yang di jalankan oleh Biro Organisasi (<https://sepakat.sumbarprov.go.id/>).

### 2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang telah dibangun untuk mendukung capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Sistem Informasi Perencanaan (Sakato Plan).

Sakato Plan merupakan sistem informasi daerah yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari menu :

- Perencanaan
- Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Data dan informasi pembangunan daerah
- Aplikasi internal Bappeda, yang memuat layanan e-kendaraan dan ruangan, UMKM untuk makan dan minum rapat, kalender perencanaan, dan Penilaian Kinerja.

didalam pengelolaannya masing-masing menu saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan dan meringkaskan input data yang tidak berulang. Sakato Plan dapat diakses dengan alamat <https://sakatoplan.sumbarprov.go.id>

2. Dashboard Pembangunan ([dashboard.sumbarprov.go.id](https://dashboard.sumbarprov.go.id)), yang merupakan platform monitoring kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. SIGAMAD - NCH (Sistim Informasi Nagari Madani – Nagari Creative Hub), yang berfungsi menghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kelurahan yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.

4. SILEK (Sistem Informasi Lepas dari Kemiskinan), yaitu instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat.

5. Sumbarepreneur ([sumbarepreneur.sumbarprov.go.id](https://sumbarepreneur.sumbarprov.go.id)), merupakan system informasi yang digunakan untuk pendaftaran kelompok sasaran melalui sistem informasi untuk mengikuti program pengembangan kewirausahaan daerah dalam rangka mencetak 100 ribu Millenial Entrepreneur, Woman Entrepreneur dan Pelaku Ekonomi Kreatif.

6. Website Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui [www.bappeda.sumbarprov.go.id](http://www.bappeda.sumbarprov.go.id). Website ini memberikan informasi berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

7. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki layanan informasi melalui kanal Youtube, Facebook dan Instagram.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50\% \right)$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensinya adalah 100%.

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2025. Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 :

**Tabel 3.2 Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja  
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

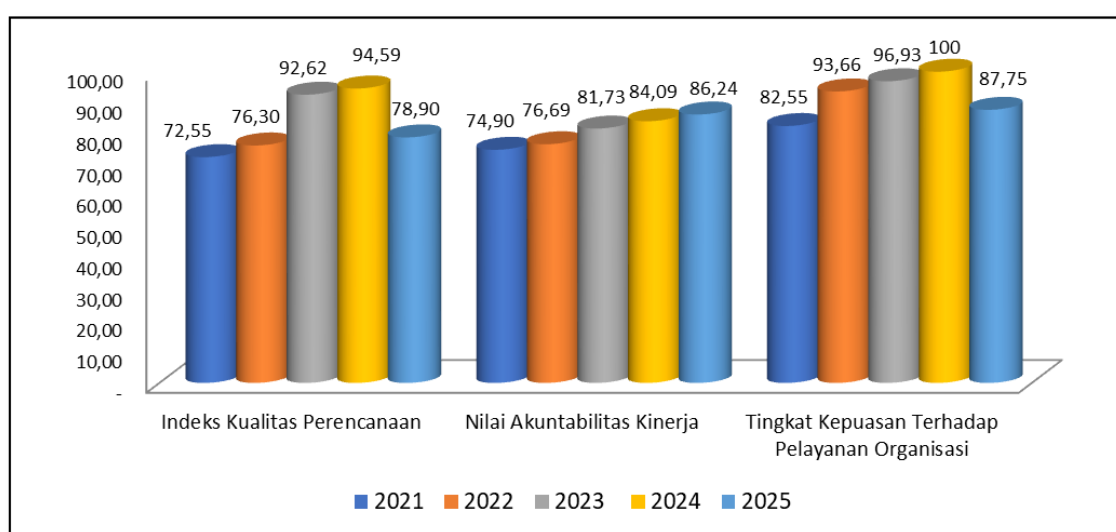
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	94,61	78,90	83,39
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	84,25	86,24	102,36
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	87,00	87,75	100,86
Jumlah Capaian 3 Indikator Kinerja Sasaran Bappeda					286,61
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025					95,54

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 pada tabel 3.2, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menunjukkan capaian kinerja yang relatif baik dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 95,54 persen. Dari tiga indikator kinerja yang ditetapkan, dua indikator telah melampaui target, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, sementara indikator Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Berikut perbandingan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 s.d 2025 sesuai dengan sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026:

**Grafik 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d Tahun 2025**



Sumber Data : Diolah dari data kinerja Bappeda Prov. Sumatera Barat

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan organisasi telah berjalan dengan baik, namun peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah masih memerlukan perhatian dan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, dilakukan analisis terhadap masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025.

### 3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada analisis berikut :



## Tujuan 1

### Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan yang didukung melalui 7 misi. Pada Misi ke 7 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, yang memiliki tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Kepala Daerah merumuskan 3 sasaran kinerja yang salah satunya yaitu terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP. 30 % dari komponen nilai evaluasi SAKIP ini adalah Perencanaan Kinerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda. Berdasarkan hal inilah Bappeda Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan 2 tujuan dan 3 sasaran.

Pada tujuan pertama ini, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi, pada tahun 2025 dengan target sebesar 26,62 terealisasi sebesar 25,92 atau sebesar 97,37%.

Sumber data indikator kinerja tujuan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi didapat melalui hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP Provinsi dengan hasil penilaian sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi Tahun 2025**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	26,09	25,92
2	Pengukuran Kinerja	30	21,95	21,91
3	Pelaporan Kinerja	15	12,81	12,82
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,13	18,20
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>78,98</b>	<b>78,85</b>

Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 tercatat sebesar 78,85, sedikit menurun dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai 78,98, atau mengalami penurunan sebesar 0,13 poin. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari penilaian terhadap empat komponen utama SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang diperoleh pada Tahun 2025 adalah 25,92 dari bobot maksimal 30, menurun dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 26,09. Penurunan capaian nilai komponen perencanaan kinerja pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih perlunya peningkatan kualitas perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi hasil, serta penguatan konsistensi keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah. Selain itu, pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan pembangunan juga masih perlu dioptimalkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ke depan akan dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain :

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan Perangkat Daerah dengan memperbaiki pohon kinerja yang logis dan cascading (penjenjangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah dengan memerhatikan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran.
3. Memastikan kualitas penyusunan Renstra disusun secara konsisten dan merata antar Perangkat daerah, dengan memperkuat analisis permasalahan dan isu strategis sebagai dasar penetapan tujuan dan sasaran.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diatas, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang diukur melalui indikator kinerja tertentu. Capaian kinerja masing-masing sasaran pada Tahun 2025 selanjutnya diuraikan pada bagian berikut :

## SASARAN 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan

<b>Capaian 2025</b> 83,39 %		<b>Perbandingan dengan Capaian Tahun 2024</b>	
		Realisasi 2024 94,59 ↓	Capaian 2024 116,78 % ↓
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Perbandingan dengan Target Akhir Renstra</b>	
94,61	78,90	Target 2026 89	Selisih 10,10 point

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi Kepala Daerah yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terutama misi ke-7 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas yang dijabarkan pada 3 sasaran yang salah satunya adalah sasaran Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan Akuntabel, Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi. Tujuan ini dicapai melalui penetapan sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang keberhasilannya diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Perencanaan.

Indeks Kualitas Perencanaan adalah angka yang didapatkan dari jumlah total seluruh nilai instrumen pengukuran kualitas perencanaan yang terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Aspek Sinergi, 2) Aspek Kualitas Perencanaan, dan 3) Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Pengukuran ini dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI terhadap dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah).

Kegunaan dari indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan ini adalah untuk melihat gambaran kondisi perencanaan Pemerintah Daerah dalam hal keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan pusat, kesesuaian penganggaran terhadap perencanaan, dan kualitas dokumen perencanaan dalam menyelesaikan isu pembangunan guna mencapai prioritas pembangunan. Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2025 Bappeda Provinsi Sumatera Barat menghasilkan 3 dokumen perencanaan, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025, dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025. Penyusunan dokumen tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus menjadi objek

penilaian dalam pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan untuk memastikan keterpaduan, konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

**Gambar 3.1 Dokumen Perencanaan yang dihasilkan pada Tahun 2025**



**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.** Sebagaimana tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 94,61. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan baseline kinerja sesuai dengan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, realisasi Indeks Kualitas Perencanaan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 mencapai 78,90 atau 83,39 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan realisasi tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun kriteria capaian termasuk tinggi sesuai dengan skala pengukuran kinerja.

**Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	94,61	78,90	83,39	Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja					83,39	

Sumber : Dokumen Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini diukur dengan formula sebagai berikut:

*Indeks Kualitas Perencanaan*

*= Jumlah skor aspek Sinergi + Kualitas Perencanaan*

*+ Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja*

Berarti :

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kualitas Perencanaan} &= 25,85 + 43,80 + 9,25 \\ &= 78,90 \end{aligned}$$

Pada tabel berikut dapat dilihat rangkuman kertas kerja penilaian Indeks Kualitas Perencanaan oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025:

**Tabel 3.5 Rangkuman Kertas Kerja Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Aspek	Bobot	Indikator	Bobot	Dokumen yang dinilai	Hasil Penilaian
1.	Sinergi	32	Keselarasn Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	9	RPJMD	7,86
			Keselarasn Dokumen RKPD dengan RKP	13	RKPD	10,57
			Kesesuaian Anggaran Daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah	10	RKPD	7,52
2.	Kualitas Perencanaan	58	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target-Program / Kegiatan di RPJMD atau RKPD	49	RKPD	37,38
			Program Unggulan Perencanaan Pembangunan	9	RKPD	6,65
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	10	Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga Terkait	10	RPJMD – Renstra OPD / RKPD- Renja OPD	8,92
<b>Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan</b>						<b>78,90</b>

Sumber : Dokumen Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.5 di atas diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Kualitas Perencanaan didukung dengan kuatnya kualitas substansi perencanaan, khususnya kesesuaian antara isu strategis, target pembangunan, serta program dan kegiatan dalam dokumen RKPD yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai indeks. Selain itu, keterhubungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja perangkat daerah juga menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi, tercermin dari keselarasan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran kinerja perangkat daerah mencapai nilai 8,92 dari bobot 10. Meskipun demikian, aspek sinergi perencanaan masih memerlukan penguatan, khususnya terkait optimalisasi kontribusi alokasi anggaran daerah terhadap prioritas pembangunan nasional, serta pada penguatan perumusan program unggulan agar lebih fokus, terukur, dan konsisten mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, peningkatan kualitas perencanaan ke depan perlu diarahkan pada penguatan konsistensi antara isu strategis, target pembangunan, program prioritas, dan dukungan penganggaran sehingga dokumen perencanaan semakin efektif menjadi instrumen pengarah pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil.

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan di tahun 2025 turun 15,69 poin dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 94,59 menjadi 78,90. Sedangkan dari sisi capaian kinerja yang membandingkan target dengan realisasi, capaian tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2024, yaitu dari 116,78% menjadi 83,39%.

**Grafik 3.2 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2024 dan 2025**



Sumber Data : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025

**Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan target akhir Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra.** Target tahun terakhir indikator kinerja indeks kualitas perencanaan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Bappeda Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diharapkan tercapai dengan nilai 89. Realisasi tahun 2025 adalah sebesar 78,90. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya dan rencana aksi yang tepat untuk tercapainya target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan target renstra Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

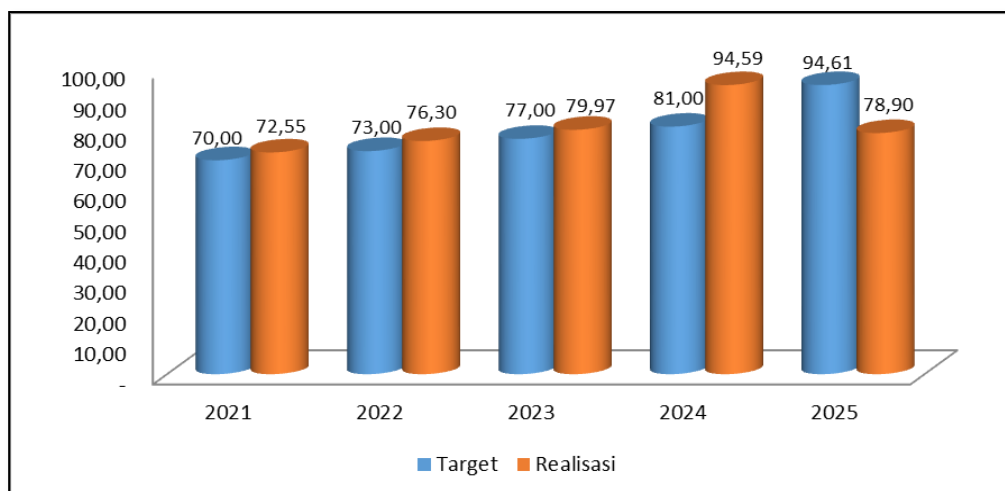
**Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	94,61	78,90	83,39	89	88,65
Rata-rata Capaian Kinerja					83,39		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025

**Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir.** Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, realisasi indikator kinerja indeks kualitas perencanaan terus menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,03. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,183. Perkembangan realisasi indeks kualitas perencanaan tahun 2021-2025 disajikan pada grafik berikut:

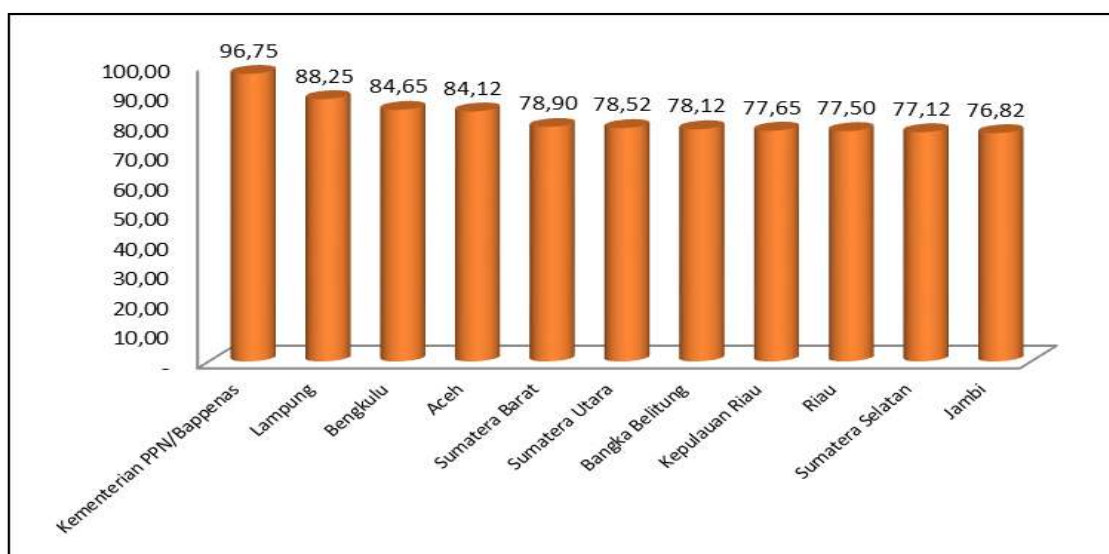
**Grafik 3.3 Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2021 s.d 2025**



Sumber Data : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Indeks Kualitas Perencanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berada dibawah nilai nasional, dengan selisih nilai sebesar 17,85 point. Dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 4 setelah Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Aceh. Perbandingan Indeks Kualitas Perencanaan Provinsi Sumatera Barat dengan nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik berikut:

**Grafik 3.4 Perbandingan Indeks Kualitas Perencanaan dengan Nasional dan Beberapa Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2025**



Sumber : Dokumen Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2025

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan.** Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2025 menurun dengan sangat signifikan. Disamping terjadinya perubahan pola penghitungan Indeks Kualitas Perencanaan oleh Kementerian PPN/Bappenas, juga terdapat faktor internal yang menghambat tercapainya target Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2025, diantaranya :

1. Masih belum maksimalnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2025.
2. Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga, karena pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tahapannya, tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra serta Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.
3. Program unggulan daerah belum sepenuhnya menjawab langsung kebutuhan daerah.
4. Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja pembangunan daerah.

5. Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai disebabkan tidak tepatnya penempatan belanja pada sub kegiatan pendukung.

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan daerah, juga telah **dilakukan upaya-upaya yang mendorong** tercapainya target yang telah ditetapkan, upaya-upaya tersebut yaitu:

1. Mengoptimalkan proses tahapan perencanaan melalui :
  - Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
  - Pelaksanaan Konsultasi Publik pada tanggal 24 Januari 2025 dan Musrenbang RKPD Tahun 2026 pada tanggal 15 April 2025 yang bertujuan untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan
2. Mengkoordinir penyusunan pohon kinerja daerah dan pohon kinerja perangkat daerah serta merumuskan manajemen risiko prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kewilayahan bersama Bappeda Kabupaten/Kota untuk menganalisis pencapaian indikator makro pembangunan daerah, perumusan permasalahan, isu strategis daerah dan perumusan rekomendasi arah kebijakan dan intervensi kewilayahan.
4. Mengembangkan inovasi perencanaan, diantaranya :
  - Sakato Plan ([sakatoplan.sumbarprov.go.id](http://sakatoplan.sumbarprov.go.id)), merupakan super Aplikasi yang menggabungkan 3 menu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan perencanaan yakni menu perencanaan, menu data dan informasi serta menu monitoring dan evaluasi.
  - Dashboard Pembangunan ([dashboard.sumbarprov.go.id](http://dashboard.sumbarprov.go.id)), yang merupakan platform monitoring kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - SIGAMAD - NCH (Sistim Informasi Nagari Madani – Nagari Creative Hub), yang berfungsi menghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kelurahan yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.
  - SILEK (Sistem Informasi Lepas dari Kemiskinan), yaitu instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat.

- Sumbarpreneur (sumbarpreneur.sumbarprov.go.id), merupakan system informasi yang digunakan untuk pendaftaran kelompok sasaran melalui sistem informasi untuk mengikuti program pengembangan kewirausahaan daerah dalam rangka mencetak 100 ribu Millennial Entrepreneur, Woman Entrepreneur dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
5. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas Dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah melalui pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah pada tanggal 13 s.d 31 Mei 2025.
  6. Meningkatkan kualitas pembinaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota melalui Fasilitasi RKPJ Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
  7. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dalam rangka Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah setiap triwulan .
  8. Meningkatkan kapasitas Fungsional Perencana baik ditingkat Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Sumatera Barat melalui pelaksanaan Ngaji Plan The Series dan Bedah Makro Pembangunan Daerah pada bulan November s.d Desember 2025.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2026**, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa upaya perbaikan dan alternatif tindak lanjut, seperti :

1. Pada tahapan proses perencanaan
  - a. Melakukan upaya perbaikan pada pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang, diantaranya :
    - Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang dilaksanakan per tema/prioritas pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah.
    - Menyediakan platform digital partisipatif untuk menjangkau masukan dari masyarakat.
    - Menindaklanjuti hasil Musrenbang dan menginformasikan kepada Publik melalui media massa.
2. Pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan
  - a. Mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kemendagri dan/atau Bappenas agar Keselarasan dalam dokumen RPJMD dan RKPJ dengan dokumen RPJMN dan RKP dapat mencapai nilai yang Maksimum.

- b. Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
  - c. Menetapkan metadata dan definisi operasional yang jelas untuk setiap indikator.
  - d. Penguatan mekanisme pengendalian pelaksanaan verifikasi dengan upaya mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan dan melaporkan kehadiran tim verifikasi kepada Pimpinan dan memasukkan kedalam WA group yang bisa diakses Kepala Perangkat Daerah.
3. Pada Tahapan Tindak Lanjut Perencanaan
- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap data yang dibutuhkan kepada OPD dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan selalu diperbaharui dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan
  - b. Berkolaborasi dan melibatkan secara aktif tokoh masyarakat, LSM dan Komunitas Lokal dalam proses perencanaan termasuk dalam melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan.
  - c. Menyampaikan hasil pembangunan secara transparan kepada masyarakat melalui dashboard pembangunan secara berkala setiap bulannya
  - d. Membuat Pedoman atau SOP Mekanisme Pengendalian terhadap Evaluasi Rencana Pembangunan.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten  
 Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan Fungsional Perencana yang saat ini berjumlah 30 orang yang tersebar di empat bidang dan Sekretariat. Fungsional Perencana inilah yang melakukan analisis dan menyusun dokumen perencanaan daerah serta melakukan evaluasi atas pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Jumlah Fungsional Perencana yang dibutuhkan sesuai usulan peta jabatan 61 orang	- Jumlah Fungsional Perencana yang ada, 30 orang.	Untuk memenuhi kebutuhan Fungsional Perencana, maka ASN Pelaksana akan diikutkan dalam uji kompetensi JFP yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas

2. Sarana dan Prasarana yang memadai  
Ketersediaan Aplikasi Sakato Plan yang merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat luas. Sakato Plan dapat diakses melalui [sakatoplan.sumbarprov.go.id /sakatoplan](http://sakatoplan.sumbarprov.go.id/sakatoplan).

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif  
Dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 83,39%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 1.393.118.252,- dengan realisasi sebesar Rp 1.317.745.875,- atau sebesar 94,59%. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 75.372.377,- atau sebesar 5,41% yang berasal dari sisa belanja makanan dan minuman rapat.

Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program yaitu 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 766.461.262,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, dan 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 626.656.990,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 17 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 1.393.118.252,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 83,39%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 1.317.745.875,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 1.393.118.252 \times 83,39\%) - Rp\ 1.317.745.875}{(Rp\ 1.393.118.252)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 1.161.721.310 - Rp\ 1.317.745.875}{Rp\ 1.393.118.252} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -0,11$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (-0,11 / 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 22\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 22% (sesuai dengan ketentuan bahwa untuk yang Nilai efisiensinya tercapai >100% maka nilai efisiensinya dibulatkan 100%) dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan dengan capaian indikator kinerja sebesar 83,39%.

Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan belanja makanan dan minuman rapat, pelaksanaan rapat koordinasi tidak menggunakan hotel tapi dilaksanakan di kantor Bappeda, serta penghematan belanja penunjang seperti ATK, cetak dan penggandaan.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan :

**Tabel 3.7 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025  
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Bidang Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan, target 94,61 dan realisasi 94,72 dengan capaian 100,12%						1.393.118.252	1.317.745.875	94,59	
			<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi</b>	<b>92%</b>	<b>92,43%</b>	<b>766.461.262</b>	<b>748.050.050</b>	<b>97,60</b>	
				<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>611.922.279</b>	<b>596.219.550</b>	<b>97,43</b>	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	611.922.279	596.219.550	97,43	Bidang P2EPD
				<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>91.800.000</b>	<b>90.193.700</b>	<b>98,25</b>	
				Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	91.800.000	90.193.700	98,25	Bidang P2EPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Bidang Penanggung Jawab
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	92%	92,43%	62.738.983	61.636.800	98,24	
				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	57 Dokumen	57 Dokumen	62.738.983	61.636.800	98,24	Bidang P2EPD
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	75%	100%	626.656.990	569.695.825	90,91	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	289.806.000	270.968.500	93,50	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	74.314.000	71.160.000	95,76	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	6.232.000	6.230.000	99,97	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	23.677.000	10.993.500	46,43	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Bidang Penanggung Jawab
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	33.650.000	32.108.000	95,42	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	12.383.000	12.241.000	98,85	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	139.550.000	138.236.000	99,06	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>170.278.750</b>	<b>145.607.025</b>	<b>85,51</b>	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	38.615.000	38.403.300	99,45	Bidang Ekonomi dan SDA
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	23.488.000	22.691.400	96,61	Bidang Ekonomi dan SDA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Bidang Penanggung Jawab
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	43.821.500	38.982.000	88,96	Bidang Ekonomi dan SDA
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	11.075.000	10.028.925	90,55	Bidang Ekonomi dan SDA
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	22.265.500	21.944.400	98,56	Bidang Ekonomi dan SDA
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	31.013.750	13.557.000	43,71	Bidang Ekonomi dan SDA
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>166.572.240</b>	<b>153.120.300</b>	<b>91,92</b>	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	14.397.000	13.775.700	95,68	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	22.507.240	21.692.800	96,38	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Bidang Penanggung Jawab
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	15.038.000	14.244.400	94,72	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	13.708.000	13.380.400	97,61	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100.922.000	90.027.000	89,20	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sumber Data : Realisasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, data diolah



## Tujuan 2

### Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan ke-2 Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 2) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani Tahun 2025**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25	86,24	102,36	82,25	104,85
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	87,00	87,75	100,86	91	96,43
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 2					101,61		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025

Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kedua telah dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 101,61%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, terdapat 1 indikator tujuan yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi yang menunjukkan pencapaian sebesar 94,43% dari target tahun terakhir Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dalam hal ini, Bappeda optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026. Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan melalui 2 sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan; 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada Tahun 2025.

## SASARAN 2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

<b>Capaian 2025 102,36 %</b>		<b>Perbandingan dengan Capaian Tahun 2024</b>	
		<b>Realisasi 2024</b>	<b>Capaian 2024</b>
		84,09	102,76 %
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Perbandingan dengan Target Akhir Renstra</b>	
84,25	86,24	<b>Target 2026</b>	<b>Selisih</b>
		82,25	Telah melebihi target Renstra

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sebagai alat ukur dalam peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja diukur melalui 4 komponen dasar manajemen kinerja yaitu :

No	Komponen yang dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen diatas memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Predikat	Interpretasi
1	AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan
2	A (Nilai >80-90)	Memuaskan
3	BB (Nilai >70-80)	Sangat Baik
4	B (Nilai >60-70)	Baik

No	Predikat	Interpretasi
5	CC (Nilai >50-60)	Cukup/Memadai
6	C (Nilai >30-50)	Kurang
7	D (Nilai >0-30)	Sangat Kurang

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.** Sebagaimana tertuang didalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 84,25. Penetapan target ini didasarkan pada hasil realiasi kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang telah dituangkan kedalam Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/106/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 86,24% dengan kategori A dari target sebesar 84,25% atau dengan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 102,36%. Nilai ini menunjukkan bahwa AKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

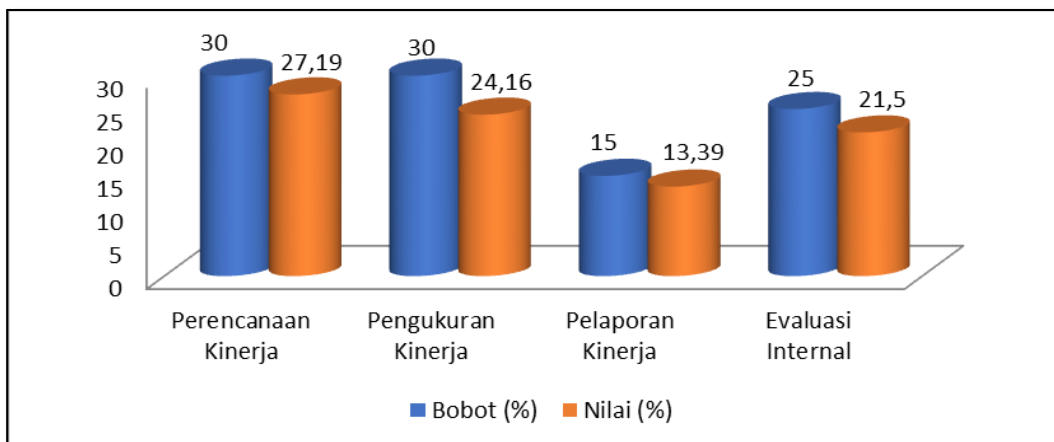
**Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25	86,24	102,36	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja					102,36	

Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inpektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 (empat) komponen tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai tertinggi pada komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,64% dari bobot 15% dan komponen terendah adalah Pengukuran Kinerja dengan nilai 23,34% dari bobot 30%. Berikut rincian komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Penilaian 2025 :

**Grafik 3.5 Capaian Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2025**

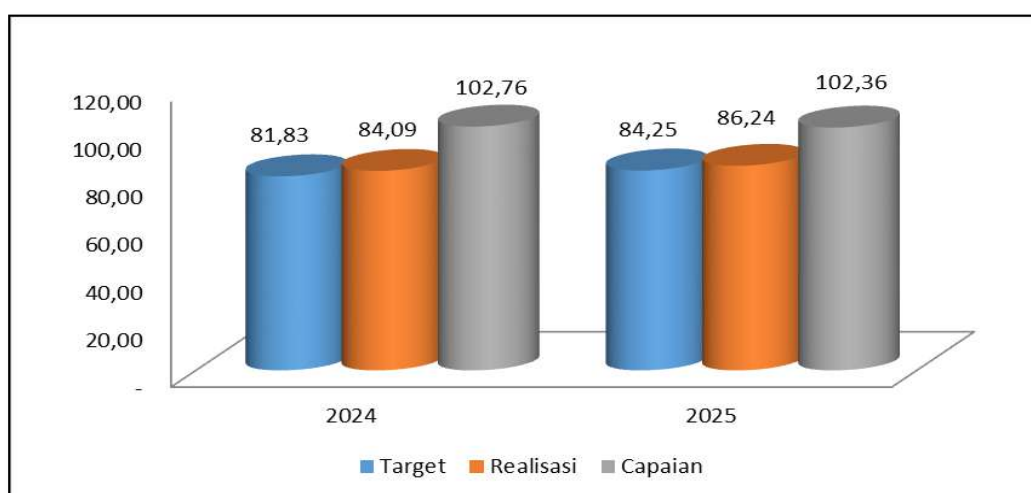


Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD di tahun 2025 naik 2,15 poin dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 84,09 menjadi 86,24. Sedangkan dari sisi capaian kinerja yang membandingkan target dengan realisasi, capaian tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2024, yaitu dari 102,76% menjadi 102,36%.

**Grafik 3.6 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2024 dan 2025**



Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Capaian kinerja ini tidak terlepas dari setiap upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 atas akuntabilitas kinerja

dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat agar bisa memberikan kebermanfaatn terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait dalam pembangunan di Sumatera Barat.

**Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan target akhir Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra.** Target tahun terakhir indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diharapkan tercapai 82,25. Realisasi tahun 2025 adalah sebesar 86,24. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun 2025 telah melampau target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar 104,85%.

Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

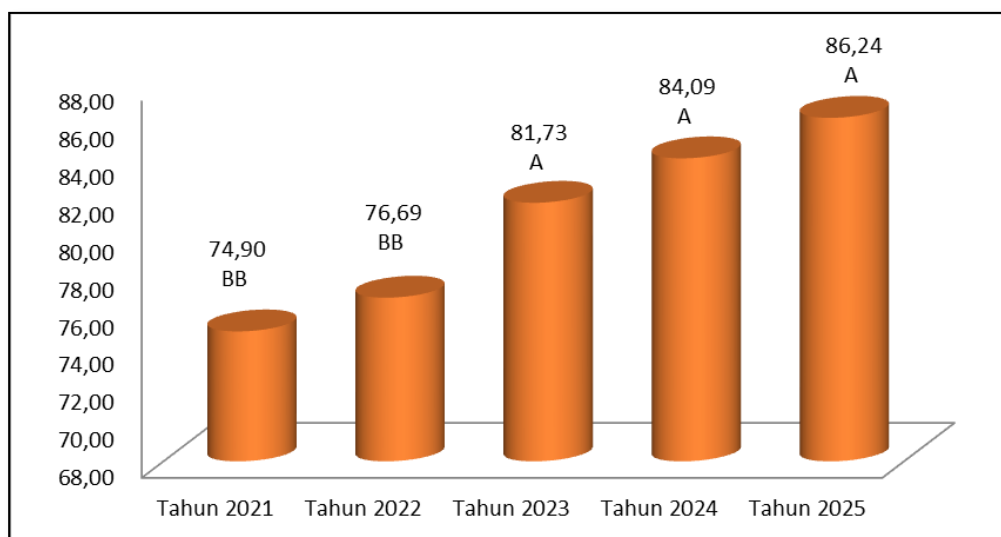
**Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25	86,24	102,36	82,25	104,85
Rata-rata Capaian Kinerja					102,36		

Sumber : Hasil LHE Inspektorat dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

**Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir.** Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD terus menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,04. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,065 dan terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,023. Perkembangan realisasi indeks kualitas perencanaan tahun 2021-2025 disajikan pada grafik berikut:

**Grafik 3.7 Perkembangan Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2021 s.d 2025**



Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, pada komponen Evaluasi Internal belum terjadi peningkatan yang maksimal yaitu dari 21,38 pada tahun 2024 menjadi 21,50 pada tahun 2025, hanya meningkat sebesar 0,16 point. Dalam hal ini, untuk komponen evaluasi internal Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan terus memperbaiki kinerja sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2021-2025.

**Tabel 3.11 Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025**

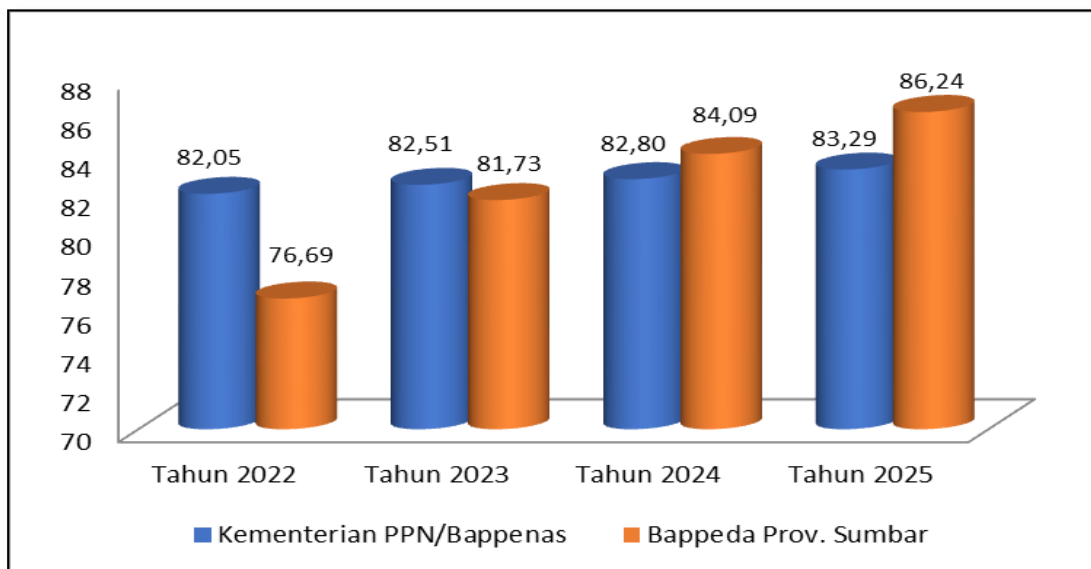
No	Aspek Komponen Penilaian	Nilai				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	25,93	27,05	27,04	26,74	27,19
2	Pengukuran Kinerja	19,17	19,79	20,93	23,34	24,16
3	Pelaporan Kinerja	10,88	12,41	11,51	12,64	13,39
4	Evaluasi Internal	6,19	6,19	22,25	21,38	21,50
5	Pencapaian Kinerja	12,75	11,25			
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>74,90</b>	<b>76,69</b>	<b>81,73</b>	<b>84,09</b>	<b>86,24</b>
<b>Kategori</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas, nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 lebih tinggi 2,95 point dari nilai SAKIP Kementerian PPN Bappenas, dimana nilai SAKIP Kementerian PPN Bappenas Tahun 2025 adalah sebesar 83,29.

Perbandingan nilai SAKIP berturut-turut sejak tahun 2022 sampai dengan 2025 tergambar pada grafik berikut :

**Grafik 3.8 Perbandingan Nilai SAKIP Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas**



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian PPN Bappenas

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan.** Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, sesuai dengan hasil rekomendasi LHE SAKIP Bappeda Tahun 2024 oleh Inspektorat, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah **melakukan upaya-upaya yang mendorong keberhasilan** tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, upaya-upaya tersebut yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

Melakukan upaya berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dari seluruh unit kerja dan pegawai dalam rangka mencapai kinerja yang direncanakan dengan langkah yang dilakukan :

- Memperkuat komitmen pegawai dalam pencapaian kinerja dengan membuat target kinerja secara berjenjang pada SKP individu melalui dialog kinerja.
- Merumuskan bersama Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja.
- Mensosialisasikan Renstra dan SAKIP di internal Bappeda.
- Menyelenggarakan rapat bulanan yang membahas pencapaian kinerja dan hambatan yang dihadapi.
- Menginformasikan capaian kinerja melalui WA group.

2. Pengukuran Kinerja

- Berkoordinasi dengan Biro Organisasi terkait pemanfaatan teknologi informasi aplikasi E-Sakip dalam pengukuran kinerja yang lebih terintegrasi.

- Hasil pengukuran kinerja telah dijadikan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan penerimaan TPP
  - Hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam perbaikan strategi dan arah kebijakan Penyusunan Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2025-2029..
  - Pemberian Reward untuk ASN Terbaik melalui aplikasi PEKA berbasis Android setiap bulannya dan Pemberian Punishment bagi ASN yang tidak bisa memenuhi target kinerja dengan melakukan pengurangan TPP.
  - Pengembangan Sakato Plan dalam memenuhi ketersediaan data yang dibutuhkan dalam pengukuran sasaran kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
3. Pelaporan Kinerja
- Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala (Realisasi Rencana Aksi) telah disertai dengan rencana tindak lanjut aktivitas perbaikan, termasuk penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan substansi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
  - Kondisi kinerja tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam laporan kinerja telah ditindaklanjuti menjadi target kinerja SKP dan rencana aksi individu Tahun 2026 oleh seluruh ASN secara berjenjang berdasarkan dialog kinerja.
4. Evaluasi Internal
- Berkoordinasi dengan Biro Organisasi terkait pemanfaatan teknologi informasi aplikasi E-Sakip dalam pemantauan kinerja yang lebih terintegrasi.
  - Melakukan perbaikan kinerja dan meningkatkan kapasitas SDM Perencana (Ngaji Plan Series dan Bedah Makro Pembangunan) sebagai bentuk pemanfaatan hasil pemantauan kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. Belum maksimalnya penerapan punishment terhadap pencapaian kinerja individu.
2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas kompetensi SDM Fungsional Perencana.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2026**, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja.
2. Memastikan Komitmen bersama dalam melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Koordinator

- dan Staf dengan memaksimalkan penerapan punishment dalam pencapaian realisasi rencana aksi kinerja individu.
3. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Renja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas.
  4. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap rencana aksi dan manajemen risiko yang telah disusun secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda
  5. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan SPIP dan Reformasi Birokrasi dapat terimplementasi sampai ke level individu.
  6. Meningkatkan kapasitas SDM Fungsional Perencana.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap Sistem AKIP

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 71 ASN Bappeda Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	Sistem AKIP sudah mulai dipahami oleh seluruh ASN Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing bidang untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

2. Sarana dan prasarana yang memadai  
Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
3. Ketersediaan Anggaran yang efektif  
Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 102,36%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 11.944.081.209,- dengan realisasi sebesar Rp 11.748.424.406,- atau sebesar 98,36%. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 195.656.803,- atau sebesar 1,64% yang berasal dari sisa belanja gaji dan tunjangan.

Anggaran ini terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang tersebar pada 2 (dua) kegiatan dengan 6 sub kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 11.944.081.209,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 102,36%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 11.748.424.406,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 11.944.081.209 \times 102,36\%) - Rp\ 11.748.424.406}{(Rp\ 11.944.081.209)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 12.225.961.526 - Rp\ 11.748.424.406}{Rp\ 11.944.081.209} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,04$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,04 / 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 60,00\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 60% dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,36%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan belanja makanan dan minuman rapat serta pelaksanaan forum Bappeda yang dilaksanakan melalui zoom meeting.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD :

**Tabel 3.12 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025  
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Bidang Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target 84,25 dan realisasi 86,24 dengan capaian sebesar 102,36%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					11.944.081.209	11.748.424.406	98,36	Sekretariat
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	-	-	-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	-	-	-	Sub Bagian Program
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	-	-	-	Sub Bagian Program
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	-	-	-	Sub Bagian Program
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	11.944.081.209	11.748.424.406	98,36	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	71 orang/bulan	11.752.921.209	11.557.864.406	98,34	Sub Bagian Keuangan
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	191.160.000	190.560.000	99,69	Sub Bagian Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	-	-	-	Sub Bagian Keuangan

## SASARAN 2.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

<b>Capaian 2025</b> <b>100,86 %</b>		<b>Perbandingan dengan Capaian Tahun 2024</b>	
		<b>Realisasi 2024</b>	<b>Capaian 2024</b>
		100	103,06%
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Perbandingan dengan Target Akhir Renstra</b>	
87	87,75	<b>Target 2026</b>	<b>Selisih</b>
		91	3,25 point

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimana pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government). Pemahaman demikian secara tematik merupakan alasan fundamental dari kehendak publik untuk menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan paradigma baru yaitu berubahnya birokrasi sebagai yang dilayani menjadi abdi masyarakat (pelayan masyarakat).

Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi sebagai alat ukur dalam peningkatan organisasi yang akuntabel dan melayani guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.** Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 87%. Target ini lebih rendah dari target yang dimuat dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Perubahan target indikator ini dilakukan dalam Perubahan Renja Tahun 2025. Perubahan target tersebut bukan merupakan indikasi penurunan kinerja namun adanya perubahan formula penghitungan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta memanfaatkan aplikasi Sepakat yang di jalankan oleh Biro Organisasi (<https://sepakat.sumbarprov.go.id/>). Penyesuaian formula tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran, memperkuat objektivitas penilaian, serta memastikan keselarasan dengan standar nasional.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menempatkan barcode survei di lobby utama yang nantinya akan terhubung dengan Aplikasi Sepakat yang dikelola oleh Biro Organisasi. Disamping itu, dalam setiap even proses perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga menampilkan barcode survei untuk bisa diisi oleh tamu atau peserta acara. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam aplikasi Sepakat meliputi 9 unsur pelayanan, yaitu Persyaratan; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Layanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta Sarana dan Prasarana.

Dari Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Aplikasi Sepakat, didapat nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 sebesar 87,75% dengan capaian 100,86% dari target yang ditetapkan. Hasil ini mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap layanan yang diberikan, serta menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik ditahun-tahun berikutnya.

**Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	87	87,75	100,86	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja					100,86	

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025

Berikut Hasil survei yang diambil dari aplikasi Sepakat untuk kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 :

**Tabel 3.14 Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Responden dan Per Unsur Pelayanan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	0812777848148	rinda	4	4	4	4	4	4	3	3	3
2	081363172251	Deri Yantoni	4	4	3	4	4	4	4	3	4
3	081363415855	Nova Susanti	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	08212124324	M. Andi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	081314216420	Tanto Dikdik Arisandi	3	3	3	4	3	3	3	3	4
6	083188860671	Zelfhi Natasya	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	082388105659	Fajriendi Syaputra	4	3	4	4	4	4	4	3	4
8	0895617970033	Roy novaldi manik	3	4	3	4	3	4	4	4	4
9	089513656132	Zahwa Fachreza	3	4	3	4	4	4	4	4	4
10	082170747109	Farhan Putra	4	4	4	4	3	3	4	3	4
11	082283619157	Affifah Zurida Sya'bani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	081267845181	Muhamad raja	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	081268153507	septiza prety nola	3	3	3	4	3	3	3	3	4
14	083129482588	Innaya Safitri	4	4	3	4	4	4	4	4	4
15	+6285692932401	Jihan Afriliana	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
16	083822557441	Arsenal Priadi	4	4	3	4	4	4	4	4	4
17	081268924606	Rudi Anwat	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	082388630558	YASSIRLI AMRINI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	081363986343	Hera Kurniawati	4	3	3	4	3	3	4	4	4
20	082317870207	Rahmad Akbar, S.STP., M.A.P	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	085263921050	Ibnu Sani Marius	3	3	3	4	3	3	3	3	3
22	08126769528	Mhd. Dira Oktavian	3	3	3	4	3	3	3	3	3
23	085271021313	Refi Senata	3	3	3	4	3	3	3	3	4
24	08116608811	Meita Ratna Ning Tyas	4	3	3	4	3	3	4	4	4
25	081261729286	Fadhli Fa Farrasy Arvi	4	3	4	4	3	4	4	3	4
26	085274629187	Hadiyatul Husna, S.SI	3	4	4	4	3	3	4	4	4
27	085274697944	FERA EZA SAFITRI	4	4	3	4	3	3	4	3	4
28	08116609048	Dina	4	4	3	4	4	3	3	3	4
29	081266514768	Anita	3	3	3	4	3	3	3	3	3
30	085364062078	Silmi khairiya	4	4	2	4	3	3	4	3	4
31	081374518750	Elka Setyawati Muas	3	3	3	4	3	3	3	3	4
32	082285969003	Dita Oktaviani Putri	4	3	3	3	3	4	3	3	4
33	08126634569	Agus Sugianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
34	08116600750	Berlian Ayu Candra	3	3	3	4	3	3	3	3	3
35	081363335733	Nurhayati, SH	3	4	3	4	3	3	3	3	4
36	085383409756	Lidya Febrina	3	4	3	4	3	3	3	3	4
37	081363068875	Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	081363968875	Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	085374611148	Gustiarmon	4	4	3	4	3	3	4	3	4
40	081266585733	Rieka Soesanti	3	3	3	4	3	3	3	3	4
Total			143	143	133	157	136	138	143	135	153
NRR			3.58	3.58	3.33	3.93	3.4	3.45	3.58	3.38	3.83
NRR Tertimbang			0.39	0.39	0.37	0.43	0.37	0.38	0.39	0.37	0.42
IKM			3.51								
Konversi IKM			87.75								
Nilai Layanan			B: Baik								

Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan	U1	Persyaratan	3.58
NRR	Nilai rata-rata	U2	Prosedur	3.58
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Waktu Pelayanan	3.33
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi	U4	Biaya/Tarif	3.93
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur	U5	Produk Layanan	3.4
<b>IKM UNIT PELAYANAN</b>		U6	Kompetensi pelaksana	3.45
<b>Mutu Pelayanan :</b>		U7	Perilaku pelaksana	3.58
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.38
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	U9	Sarana dan Prasarana	3.83
C (Kurang Baik)	: 65 - 76,60			
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99			

Sumber : [sepakat.sumbarprov.go.id](http://sepakat.sumbarprov.go.id)

Berdasarkan hasil survei dari aplikasi Sekapat, diketahui bahwa jumlah responden yang mengisi kuesioner terhadap layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah sebanyak 40 orang responden. Sesuai dengan formula penghitungan, maka diperoleh nilai IKM Bappeda Provinsi Sumatera Barat :

$$IKM = \left( \frac{\sum(n_i \times s_i)}{N} \right) \times \frac{1}{k} \times 25$$

$$IKM = 3,51 \times 25$$

$$IKM = 87,75$$

Dari 9 Pertanyaan yang ditanyakan kepada stakeholders diperoleh informasi terkait Waktu Pelayanan serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang harus diperbaiki. Berdasarkan rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat tersebut, predikat pelayanan publik Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 termasuk dalam kategori "Baik".

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun ini mengalami penurunan yaitu dari tingkat kepuasan pelayanan organisasi sebesar 100% pada tahun 2024 berdasarkan e-survei kepuasan yang diisi oleh setiap tamu yang datang ke Bappeda menjadi 87,75% berdasarkan aplikasi Sepakat.

**Grafik 3.9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2024 dan 2025**

Sumber : e-survei Bappeda (2024) dan Aplikasi Sepakat (2025)

**Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan target akhir Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra.** Target tahun terakhir indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diharapkan tercapai 91%. Realisasi tahun 2025 adalah sebesar 87,75%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung tercapainya sasaran Kepala Daerah “Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan”.

Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan target renstra Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	87,00	87,75	100,86	91	96,43
Rata-rata Capaian Kinerja					100,86		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025

**Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir.** Dalam kurun waktu 2021 s.d tahun 2024, realisasi indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi terus menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,06. Setelah dilakukan perubahan formula penghitungan di tahun 2025 dengan menggunakan aplikasi Sepakat, terjadi penurunan. Perkembangan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

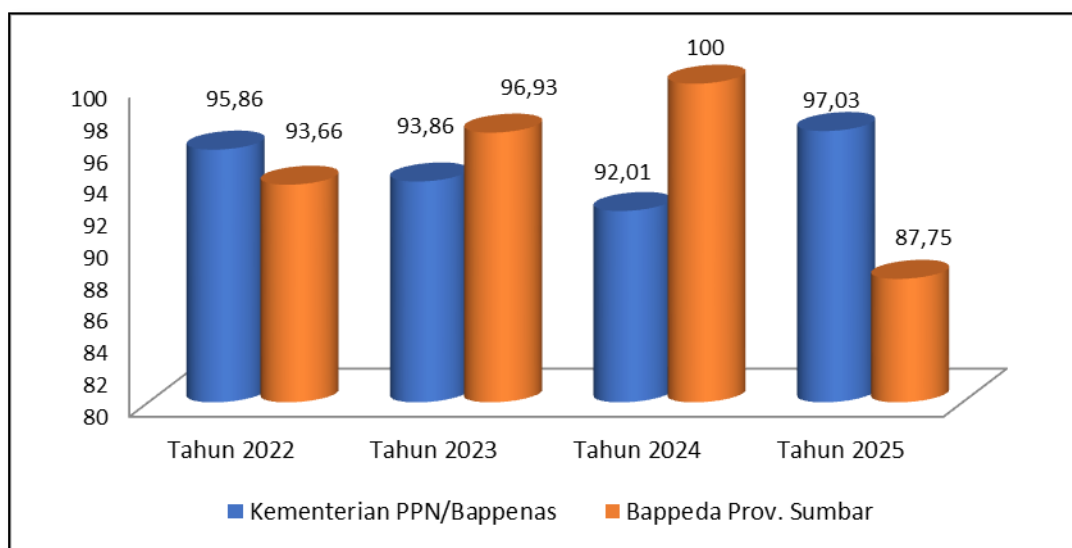
**Grafik 3.10 Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organsiasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2025**



Sumber : Hasil E-Survei Statistik Tingkat Kepuasan Layanan Bappeda

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan layanan pada Kementerian PPN/Bappenas, nilai tingkat kepuasan terhadap pelayanan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dibawah capaian Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas diketahui nilai indeks kepuasan terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2025 adalah 97,03%, mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Stakeholder Kementerian PPN/Bappenas merespon positif terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan, menunjukkan kebutuhan dan harapan stakeholder telah terpenuhi dengan baik dan meningkatkan kepercayaan serta dukungan stakeholder terhadap reputasi dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

**Grafik 3.11 Perbandingan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 s.d 2025**



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan.** Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah **melakukan upaya-upaya yang mendorong keberhasilan** tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, upaya-upaya tersebut yaitu :

1. Mengembangkan inovasi pelayanan publik seperti Sakato Plan untuk memudahkan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan perencanaan serta Dashboard Pembangunan dalam memberikan informasi capaian kinerja pembangunan daerah.
2. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendukung kinerja Bappeda dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, seperti perbaikan ruangan rapat dan fasilitas pendukungnya.
3. Menyempurnakan dan mengupdate berita kinerja Bappeda pada website resmi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan media sosial Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. SDM yang mengoperasikan aplikasi masih terbatas di Sekretariat.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan yang belum optimal, sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan masih terbatas.
3. Belum maksimalnya seluruh tamu Bappeda yang memberikan penilaian terhadap kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sepakat.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2026**, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Menyesuaikan kebutuhan SDM yang mengoperasikan aplikasi untuk memperlancar operasional aplikasi yang ada.
2. Memastikan pelaksana pelayanan termasuk front office telah menerapkan budaya BerAKHLAK dan melaksanakan pelayanan sesuai SOP.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, termasuk digitalisasi layanan dan sistem pengaduan layanan.
4. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala (triwulan) dalam bentuk pertemuan/rapat internal agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada di lingkup layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten  
Saat ini di Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 orang tenaga IT yang mendukung berfungsinya aplikasi Sakato Plan dalam proses perencanaan, evaluasi dan pengendalian, serta 21 orang tenaga pelayanan umum kantor.
2. Sarana dan prasarana yang memadai  
Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

**Gambar 3.2 Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat**



3. Ketersediaan Anggaran yang efektif
- Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 100,86%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 4.265.686.828,- dengan realisasi sebesar Rp 4.096.928.813,- atau sebesar 96,04%. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 168.758.015,- atau sebesar 3,96% yang berasal dari sisa belanja pengadaan laptop, sisa belanja pemeliharaan peralatan kantor dan sisa belanja pemeliharaan bangunan kantor.

Anggaran ini terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang tersebar pada 6 kegiatan dengan 15 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 4.265.686.828,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100,86%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 4.096.928.813,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 4.265.686.828 \times 100,86\%) - Rp\ 4.096.928.813}{(Rp\ 4.265.686.828)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 4.302.371.735 - Rp\ 4.096.928.813}{Rp\ 4.265.686.828} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,05$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,05 / 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 62,04\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 62,04% dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,86%. Efisiensi terutama dilakukan dalam belanja pengadaan laptop, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan bangunan kantor.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi:

**Tabel 3.16 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025  
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Bidang Penanggung Jawab
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, target 87 dan realisasi 87,75 dengan capaian sebesar 100,86%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					4.265.686.828	4.096.928.813	96,04	Sekretariat
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	106.759.690	90.845.358	85,09	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	106.759.690	90.845.358	85,09	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	7.500.000	7.050.000	94,00	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang	6 orang	7.500.000	7.050.000	94,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.836.825.360	1.786.201.300	97,24	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	8.263.730	8.258.400	99,94	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	8.965.700	8.800.000	98,15	Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Bidang Penanggung Jawab
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	68 Paket	68 Paket	100.354.809	95.640.784	95,30	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	170.468.000	158.166.556	92,78	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.171.773.121	1.138.335.560	97,15	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	377.000.000	377.000.000	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>294.900.000</b>	<b>273.060.000</b>	<b>92,59</b>	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 unit	12 unit	294.900.000	273.060.000	92,59	Subbag Umum dan Kepegawaian
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.656.601.778</b>	<b>1.617.899.806</b>	<b>97,66</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	238.140.000	230.349.274	96,73	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.418.461.778	1.387.550.532	97,82	Subbag Umum dan Kepegawaian

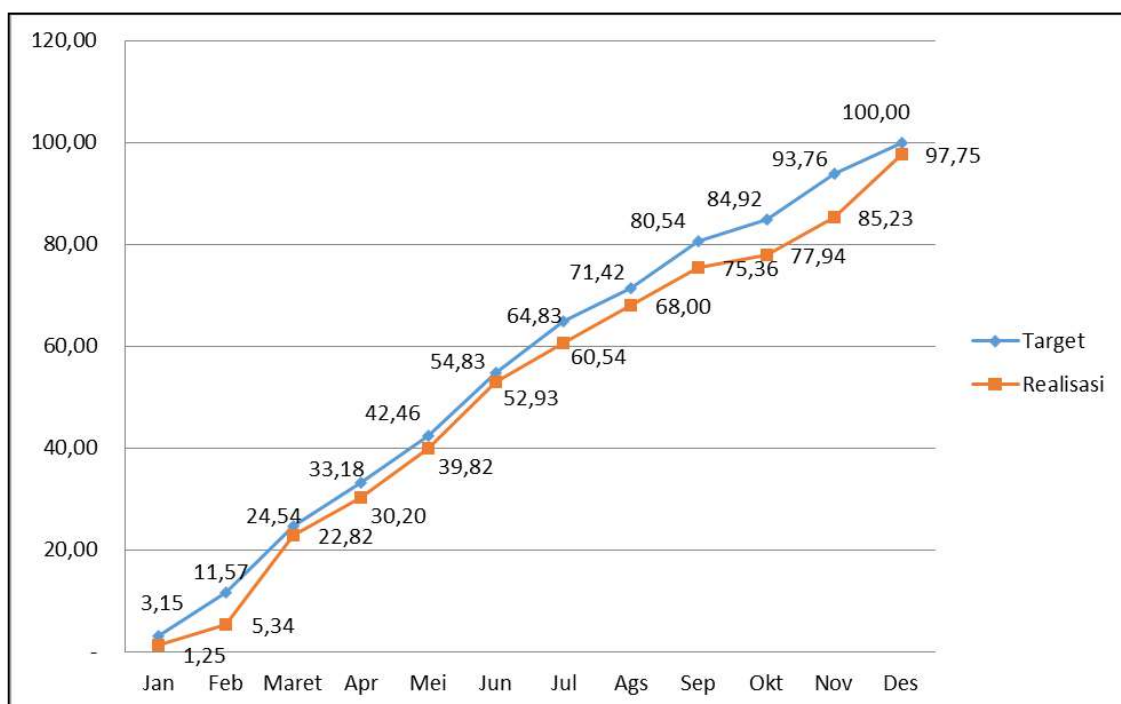
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Bidang Penanggung Jawab
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%	363.100.000	321.872.349	88,65	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	216.000.000	208.443.461	96,50	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70 unit	55.900.000	37.991.800	67,96	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	54.050.000	43.650.328	80,76	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	34 unit	34 unit	37.150.000	31.786.760	85,56	Subbag Umum dan Kepegawaian

Sumber Data : Realisasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, data diolah

### 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat anggaran melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 17.602.886.289,-. Anggaran tersebut tersebar di 3 program, 14 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Hingga tanggal 31 Desember 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 17.163.099.094,- atau sebesar 97,50%. Adapun perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan target penyerapan dapat dilihat pada grafik 3.9 berikut :

**Grafik 3.12 Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Per Bulan Tahun 2025**



Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa secara umum capaian realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 belum mencapai target penyerapan setiap bulannya. Terlihat adanya gap antara target dan realisasi disetiap bulannya.

**Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja.** Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut :

**Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Anggaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	94,61	78,90	83,39	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	766.461.262	748.050.050	97,60
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	626.656.990	569.695.825	90,91
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25	86,24	102,36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.209.768.037	15.845.353.219	97,75
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87	87,75	100,86				
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>95,54</b>	<b>Capaian Anggaran</b>	<b>17.602.886.289</b>	<b>17.163.099.094</b>	<b>97,50</b>

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, data diolah

Berdasarkan tabel 3.16 di atas, diketahui bahwa

1. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian 3 sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 17.602.886.289,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 95,54%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 17.163.099.094,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 17.602.886.289 \times 95,54\%) - Rp\ 17.163.099.094}{(Rp\ 17.602.886.289)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 16.817.797.561 - Rp\ 17.163.099.094}{Rp\ 17.602.886.289} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,02$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

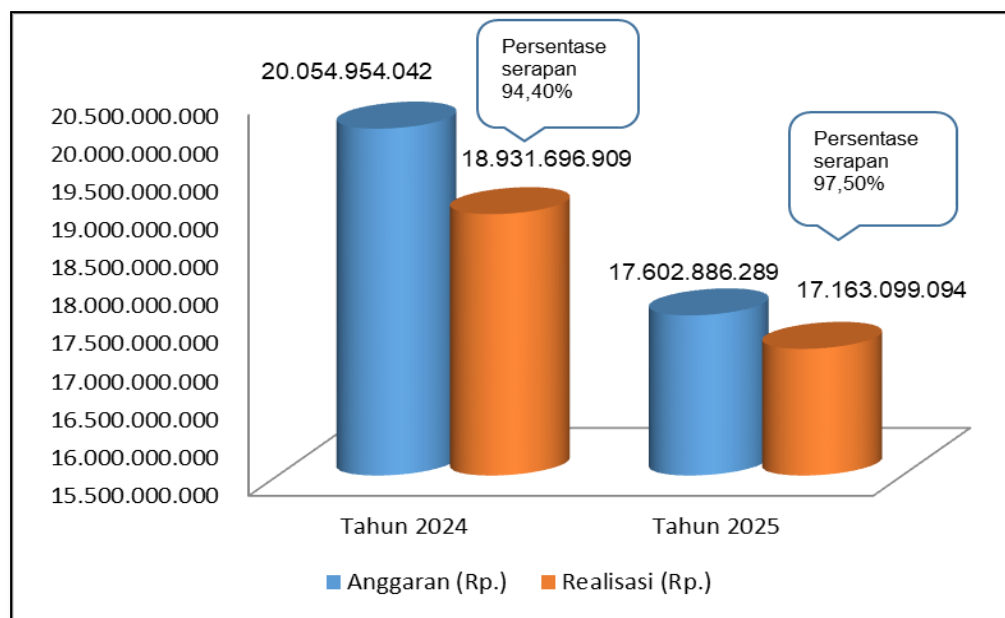
$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,02 / 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 45,10\%$$

2. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 45,10% dalam mendukung pencapaian 3 sasaran strategis yang diukur melalui 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 95,54% Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan belanja makanan dan minuman rapat, pelaksanaan rapat koordinasi tidak menggunakan hotel tapi dilaksanakan di kantor Bappeda, penghematan belanja penunjang seperti ATK, cetak dan penggandaan, pengadaan laptop, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan bangunan kantor.
3. Pada tahun 2025 serapan anggaran terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan sebesar 97,75%, berikutnya Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 97,67% dan terakhir Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 90,94%.

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2024, capaian realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,10 point, dimana realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 94,40% dan ditahun 2025 sebesar 97,50% sebagaimana tergambar pada grafik 3.10 berikut.

**Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024**



Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, diolah

Peningkatan serapan anggaran pada tahun 2025 terjadi karena adanya arahan dari Kepala Bappeda untuk melakukan efisiensi dengan lebih mengutamakan pelaksanaan rapat melalui zoom meeting sehingga terjadi penghematan untuk belanja makanan dan minuman rapat. Secara rinci realisasi anggaran per sub kegiatan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.17 sebagai berikut:

**Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Per Sub Kegiatan Tahun 2025**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN					17.602.886.289	17.163.099.094	97,50
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					17.602.886.289	17.163.099.094	97,50
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					16.209.768.037	15.845.353.219	97,75

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	<b>DAERAH PROVINSI</b>							
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100	-	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	100	-	-	-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100	-	-	-
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>11.944.081.209</b>	<b>11.748.424.406</b>	<b>98,36</b>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	71 orang/bulan	100	11.752.921.209	11.557.864.406	98,34
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100	191.160.000	190.560.000	99,69
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	100	-	-	-
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>106.759.690</b>	<b>90.845.358</b>	<b>85,09</b>
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	100	106.759.690	90.845.358	85,09
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.050.000</b>	<b>94,00</b>
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang	6 orang	100	7.500.000	7.050.000	94,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.836.825.360</b>	<b>1.786.201.300</b>	<b>97,24</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 paket	100	8.263.730	8.258.400	99,94
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100	8.965.700	8.800.000	98,15
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	68 Paket	68 Paket	100	100.354.809	95.640.784	95,30
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100	170.468.000	158.166.556	92,78
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	1.171.773.121	1.138.335.560	97,15
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	377.000.000	377.000.000	100,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>294.900.000</b>	<b>273.060.000</b>	<b>92,59</b>
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit	12 Unit	100	294.900.000	273.060.000	92,59
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.656.601.778</b>	<b>1.617.899.806</b>	<b>97,66</b>
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100	238.140.000	230.349.274	96,73
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	1.418.461.778	1.387.550.532	97,82
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>363.100.000</b>	<b>321.872.349</b>	<b>88,65</b>
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100	216.000.000	208.443.461	96,50
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	70 unit	70 unit	100	55.900.000	37.991.800	67,96

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
		Dipelihara						
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100	54.050.000	43.650.328	80,76
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	34 unit	100	37.150.000	31.786.760	85,56
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</b>		<b>92%</b>	<b>92,43%</b>	<b>100,48</b>	<b>766.461.262</b>	<b>748.050.050</b>	<b>97,60</b>
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>611.922.279</b>	<b>596.219.550</b>	<b>97,43</b>
22	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	100	611.922.279	596.219.550	97,43
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>91.800.000</b>	<b>90.193.700</b>	<b>98,25</b>
23	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	91.800.000	90.193.700	98,25
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>92%</b>	<b>92,43%</b>	<b>100,48</b>	<b>62.738.983</b>	<b>61.636.800</b>	<b>98,24</b>
24	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	57 Dokumen	57 dokumen	100	62.738.983	61.636.800	98,24
<b>III</b>	<b>Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>133,33</b>	<b>626.656.990</b>	<b>569.695.825</b>	<b>90,91</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>289.806.000</b>	<b>270.968.500</b>	<b>93,50</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	<b>Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>							
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	100	74.314.000	71.160.000	95,76
26	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	100	6.232.000	6.230.000	99,97
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 laporan	100	23.677.000	10.993.500	46,43
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	100	33.650.000	32.108.000	95,42
29	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	100	12.383.000	12.241.000	98,85
30	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 laporan	100	139.550.000	138.236.000	99,06
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>170.278.750</b>	<b>145.607.025</b>	<b>85,51</b>
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Dokumen	3 dokumen	100	38.615.000	38.403.300	99,45

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)						
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	100	23.488.000	22.691.400	96,61
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 laporan	100	43.821.500	38.982.000	88,96
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	3 dokumen	100	11.075.000	10.028.925	90,55
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 dokumen	100	22.265.500	21.944.400	98,56
36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 laporan	100	31.013.750	13.557.000	43,71
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>166.572.240</b>	<b>153.120.300</b>	<b>91,92</b>
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	3 dokumen	100	14.397.000	13.775.700	95,68
38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	100	22.507.240	21.692.800	96,38
39	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	1 Laporan	1 laporan	100	15.038.000	14.244.400	94,72

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur						
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	3 dokumen	100	13.708.000	13.380.400	97,61
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 laporan	100	100.922.000	90.027.000	89,20
<b>Total</b>						<b>17.602.886.289</b>	<b>17.163.099.094</b>	<b>97,50</b>

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari 41 sub kegiatan hanya terdapat 8 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90% yang disebabkan terjadinya efisiensi belanja sesuai dengan arahan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 8 sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% tersebut secara garis besar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dimana sampai akhir Tahun Anggaran 2025 terlihat dengan realisasi keuangan sebesar 97,50%, sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai 95,54% atau tergolong dalam kriteria Sangat Baik.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2026**, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan dan melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah dibuat.
3. Memastikan kegiatan pendukung tidak lebih besar dari kegiatan utama dalam pencapaian outcome kegiatan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan
5. Setiap Bidang adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda.

6. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.

### **3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2025**

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025 merupakan salah satu wujud pengakuan atas capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Peringkat ke-4 sebagai Tim Pembina Provinsi Terbaik se- Indonesia dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Kementerian Kesehatan.
2. Penghargaan dari Polda Sumatera Barat atas Dedikasi dan Kontribusi dalam Mendukung Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Keselamatan Berlalu Lintas, serta Peran Aktif dalam Sinkronisasi Kebijakan yang Memperkuat Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan langkah-langkah aksi pada masa yang akan datang. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2025 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Catatan rekomendasi dari Hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2024 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sudah ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2025.
2. Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 dapat dinyatakan “berhasil” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,54% dan realisasi anggaran sebesar 97,50%.
3. Dari analisis terhadap sasaran 1, yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, terealisasi 78,90 dari target 94,61 dengan tingkat capaian 83,39%. Hal ini menunjukkan realisasi tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun kriteria capaian termasuk tinggi sesuai dengan skala pengukuran kinerja.
4. Dari analisis terhadap sasaran 2, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, terealisasi 86,24 dari target 84,25 dengan tingkat capaian 102,36%. Dimana, pada tahun 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/106/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 86,24 dengan kategori “A”.

5. Dari analisis terhadap sasaran 3, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, terealisasi 87,75 dari target 87 dengan tingkat capaian 100,86%, dalam artian bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik. Sumber data pada pada indiktaor kinerja ini adalah berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Aplikasi Sepakat yang dikeluarkan oleh Biro Organisasi.
6. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 17.602.886.289,- dapat direalisasikan sebesar Rp 17.163.099.094,- atau sebesar 97,50%. Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, pada tahun 2025 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 50,02%.

#### **4.2 TINDAK LANJUT KEDEPAN**

Berdasarkan analisis atas capaian kinerja dan kondisi yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026, antara lain :

1. Melakukan upaya perbaikan pada pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang, diantaranya :
  - a. Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang dilaksanakan per tema/prioritas pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah.
  - b. Mendorong keterlibatan aktif akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan
  - c. Menyediakan platform digital partisipatif untuk menjangkau masukan dari masyarakat.
  - d. Menindaklanjuti hasil Musrenbang dan menginformasikan kepada Publik melalui media massa.
2. Mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kemendagri dan/atau Bappenas agar Keselarasan dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen RPJMN dan RKP dapat mencapai nilai yang Maksimum.
3. Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

4. Penguatan mekanisme pengendalian pelaksanaan verifikasi dengan upaya mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan dan melaporkan kehadiran tim verifikasi kepada Pimpinan dan memasukkan kedalam WA group yang bisa diakses Kepala Perangkat Daerah.
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap data yang dibutuhkan kepada OPD dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan selalu diperbaharui dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan
6. Berkolaborasi dan melibatkan secara aktif tokoh masyarakat, LSM dan Komunitas Lokal dalam proses perencanaan termasuk dalam melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan.
7. Menyampaikan hasil pembangunan secara transparan kepada masyarakat melalui dashboard pembangunan secara berkala setiap bulannya
8. Membuat Pedoman atau SOP Mekanisme Pengendalian terhadap Evaluasi Rencana Pembangunan.
9. Penerapan Manajemen Risiko dalam penyusunan perencanaan sebagai upaya awal terhadap kemungkinan munculnya penghambat tercapainya target pembangunan daerah.
10. Mengembangkan profesionalisme perencana melalui penulisan dan publikasi policy paper dan policy brief terkait perencanaan pembangunan daerah dan dinamikanya.

Selama tahun 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menghasilkan dokumen penting yang menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, mahasiswa, dan lembaga terkait lainnya. Kedepan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan terus berkomitmen meningkatkan kinerjanya sehingga bisa menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas yang dapat diimplementasikan dalam program kegiatan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat.

*LAMPIRAN*



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555  
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEDI ISWANDI, ST, MM.**  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **MAHYELDI**  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 03 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

**MAHYELDI**

**PIHAK PERTAMA**

**MEDI ISWANDI, ST, MM.**

NIP. 19750502 199903 1 004

## PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	1.1	Indeks Kualitas Perencanaan	95
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	3.1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	98,00


Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 17.709.888.374	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.371.298.000	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.244.898.500	APBD
4.	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp 1.090.450.000	APBN
JUMLAH		Rp 21.416.534.874	

Padang, 03 Januari 2025

Gubernur Sumatera Barat

  
MAHYELDI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Kepala,

  
MEDI ISWANDI, ST, MM.  
NIP. 19750502 199903 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555  
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUDHA PRIMA, S.STP. M.Si**  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **MAHYELDI**  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 8 September 2025

**PIHAK KEDUA**

**MAHYELDI**

**PIHAK PERTAMA**

**YUDHA PRIMA, S.STP. M.Si**

NIP. 19820121 200012 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

**OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN : 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	1.1	Indeks Kualitas Perencanaan	94,61
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	3.1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,00

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	16.209.768.037	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	766.461.262	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	626.656.990	APBD
JUMLAH		Rp	17.602.886.289	

Padang, 8 September 2025

Gubernur Sumatera Barat



**MAHYELDI**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Plt. Kepala,



**YUDHA PRIMA, S.STP. M.Si**  
NIP. 19820121 200012 1 001

## PENGHARGAAN YANG DITERIMA PADA TAHUN 2025

### PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT



### PENGHARGAAN DARI KAPOLDA SUMBAR



**MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP TAHUN 2025  
PADA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Komponen Penilaian	Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan	Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi	Target	Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Masalah yang dihadapi
1.	Perencanaan Kinerja Nilai : 27,19 (dari bobot 30)	Melakukan upaya berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dari seluruh unit kerja dan pegawai dalam rangka mencapai kinerja yang direncanakan	Mensosialisasikan Renstra dan SAKIP di internal Bappeda	Tersosialisasikannya Renstra dan SAKIP kepada 71 ASN Bappeda melalui rapat dan melalui WA group	11 Agustus 2025	Sekretariat	Telah selesai dilaksanakan	Tidak ada permasalahan
			Menyelenggarakan rapat bulanan yang membahas pencapaian kinerja dan hambatan yang dihadapi	Notulen Rapat	Agustus s.d Desember 2025	Sekretariat	Telah selesai dilaksanakan	Tidak ada permasalahan
			Menginformasikan capaian kinerja melalui WA group	1 Matrik dan tabel capaian kinerja	Agustus s.d Desember 2025	Sekretariat	Telah selesai dilaksanakan	Tidak ada permasalahan
			Menguatkan komitmen pegawai dalam pencapaian kinerja dengan membuat target kinerja secara berjenjang pada SKP individu melalui dialog kinerja	71 SKP ASN Bappeda	Januari 2026	Sekretariat	Akan dituangkan dalam SKP Tahun 2026 di bulan Januari	Tidak ada permasalahan
2.	Pengukuran Kinerja Nilai : 24,16 (dari bobot 30)	Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi terkait pemanfaatan teknologi informasi aplikasi E-Sakip dalam pengukuran kinerja yang lebih terintegrasi	Berkoordinasi dengan Biro Organisasi terkait pemanfaatan teknologi informasi aplikasi E-Sakip dalam pengukuran kinerja yang lebih terintegrasi	1 aplikasi e-sakip	Oktober 2025	Sekretariat dan Bidang P2EPD	Pemanfaatan teknologi informasi aplikasi E-Sakip dalam pengukuran kinerja yang lebih terintegrasi telah dikoordinasikan ke Biro Organisasi	Tidak ada permasalahan
		Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian penghasilan, penempatan/penghapusan jabatan, dan penyesuaian organisasi.	Hasil pengukuran kinerja telah dijadikan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan penerimaan TPP	1 Rekap TPP ASN Bappeda	Agustus s.d Desember 2025	Sekretariat	Telah selesai dilaksanakan	Tidak ada permasalahan
		Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai tolak ukur mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja	Hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam perbaikan strategi dan arah kebijakan Penyusunan Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2025-2029	1 dokumen Renstra	Agustus 2025	Sekretariat	Telah selesai dilaksanakan	Tidak ada permasalahan

No	Komponen Penilaian	Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan	Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi	Target	Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Masalah yang dihadapi
3.	Pelaporan Kinerja Nilai : 13,39 (dari bobot 15)	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala Realisasi Rencana Aksi telah disertai dengan rencana tindak lanjut aktivitas perbaikan, termasuk penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan substansi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan	Tersusun 1 (satu) dokumen rencana aksi yang dilengkapi dengan tindak lanjut aktivitas perbaikan	Triwulan 3 Tahun 2025	Sekretariat	Telah selesai dilaksanakan	Tidak ada permasalahan
		Pimpinan dan seluruh unit kerja terus berupaya meningkatkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sehingga menjadi budaya kinerja organisasi	Kondisi kinerja tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam laporan kinerja telah ditindaklanjuti menjadi target kinerja SKP dan rencana aksi individu Tahun 2026 oleh seluruh ASN secara berjenjang berdasarkan dialog kinerja	71 SKP ASN Bappeda	Januari 2026	Sekretariat	Akan dituangkan dalam SKP Tahun 2026 di bulan Januari	Tidak ada permasalahan
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Nilai : 21,50 (dari bobot 25)	Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi terkait pemanfaatan Teknologi Informasi aplikasi E-Sakip dalam pemantauan kinerja sampai dengan level staf yang lebih terintegrasi	Berkoordinasi dengan Biro Organisasi terkait pemanfaatan teknologi informasi aplikasi E-Sakip (SAKINAH) dalam pemantauan kinerja yang lebih terintegrasi	1 aplikasi e-sakip	Oktober 2025	Sekretariat dan Bidang P2EPD	Pemanfaatan teknologi informasi aplikasi E-Sakip (SAKINAH) dalam pemantauan kinerja yang lebih terintegrasi telah dikoordinasikan ke Biro Organisasi	Tidak ada permasalahan
		Memanfaatkan hasil pemantauan kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja	Melakukan perbaikan kinerja dan meningkatkan kapasitas SDM Perencana (Ngaji Plan Series dan Bedah Makro Pembangunan) sebagai bentuk pemanfaatan hasil pemantauan kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Bappeda Provisni Sumatera Barat	1 Laporan Kinerja	Desember 2025	Sekretariat	On Progress sampai Desember 2025	Tidak ada permasalahan